

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A.Y. Suryanajaya, *Seri Administrasi Keuangan Negara/Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Eko Jaya, Jakarta, 2012.
- Abdilla Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*, Cetakan Kesatu, Golden Terayon Press, Jakarta, 2012.
- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Abdul Qodim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cetakan Kedua, Dar al-Ilmi Lilmalayin, 1408 H/1988 M, diterjemahkan oleh Ahmad S., dkk., *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al Iqtishadiyah al-Mutsala*, diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Izzah, Bangil Jatim, 1422 H/2001 M.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad-Diniyyah*, Dar al-Kutub Al-Araby, Beirut, 1978, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Prinsip-Prinsip Penyelenggara-an Negara Islam*, Cetakan Pertama, Darul Falah, Jakarta, 2000.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- , *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005.

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara***, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- , ***Hukum Tata Negara RI***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, ***Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah***, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004.
- Effendy Perangin, ***Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Erly Suandy, ***Hukum Pajak***, Edisi 5, Jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Gazi Inayah, ***Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak***, Cetakan Kesatu, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2003.
- Gusfahmi, ***Pajak Menurut Syariah***, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- I Gde Pantja Astawa, ***Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2008.
- Imam Syafi'i, ***Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al-Fiqh***, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005.
- Inu Kencana Syaf'i, ***Sistem Pemerintahan Indonesia***, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Irwan Soehartono, ***Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya***, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, ***Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab***, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dan Khalifa, Pustaka Al-Kautsar Group, Jakarta, 2006.
- Jawade Hafidz Arsyad, ***Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)***, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Juanda, ***Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah***, Alumni, Bandung, 2008.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- , *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Umer Chapra, *Islam and he Economic Challenge, The Islamic Fondation and The International Institute of Islamic Though*, USA, 1416 H/1995 M, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta, 2000.
- Mardiasmo, *Serial Otonomi Daerah, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cetakan Kesatu, Buku II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketiga, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006.

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua (Revisi), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009.

—————, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2010 tentang *Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah :

Amin Purnawan, *Rekonstruksi Politik Hukum Pajak Penghasilan (PPH) Badan Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Keadilan Beban Pajak)*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

D. Internet :

Eddhi Wahyudi H., *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, diakses dalam <https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb/>, tanggal 11 Agustus 2017, jam : 10.05 pm.